



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.77-HUK/I/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 100.3/BA.39.1/SETDA.Huk, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan di adakan perubahan apabila di pandang perlu.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

- Tembusan Yth. :
- 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - 2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.77-HUK/I/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
1	Badan Pendapatan Daerah	1) Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara pemberian Pembebasan dan pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; 2) Tata Cara Pemberian, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 4) Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 5) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6) Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Secara elektronik; 7) Pengelolaan Pajak Daerah Pecara <i>Online</i> ; 8) Pengawasan terhadap Kegiatan Transaksi Usaha Wajib Pajak; 9) Road Map Pengembangan Digitalisasi Sistem Pajak Daerah; 10) Pelaksanaan Opsen; 11) Kode Etik; 12) Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan; 3) Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Tata cara Penanganan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Petunjuk Pelaksanaan BOKD; 2) Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; 3) Pencegahan Percepatan Penanganan dan Penurunan Stunting Kota Bekasi; 4) Pemberian Uang Operasional Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Tingkat Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2025; 5) Tenaga Administrasi Pengolahan Data Tingkat Kota/Kecamatan/kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2025; 6) Ketahanan Keluarga; 7) Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia; 8) Kampung KB.
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026; 2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025; 3) Strategi Sanitasi Kota, Kota Bekasi; 4) Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit di Kota Bekasi; 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026; 6) Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029; 7) Perubahan Rencana Srategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026; 8) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 3) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 4) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 5) Analisis Standar Belanja Fisik; 6) Kebijakan Akuntansi; 7) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		8) Kebijakan Pendukung Laporan Keuangan; 9) Standar Satuan Harga Tahun 2026; 10) Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Diatas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bekasi; 11) Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi; 12) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 13) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi; 2) Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Bekasi; 3) Penyelenggaraan Izin Reklame.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1) Tata Cara Pelayanan Penanganan Anak dari Tindakan Kekerasan Perdagangan dan Eksploitasi; 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; 3) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi; 4) Perlindungan yang Wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Perempuan.
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
11	Dinas Kesehatan	1) Depot Air Minum; 2) Penanggulangan Penyakit Menular.
12	Dinas Lingkungan Hidup	1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 2) Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		3) Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Pengurangan Sampah.
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1) Perubahan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 57.B Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; 2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Bekasi; 3) Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan; 4) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Manajemen <i>Corporate University</i> (Manajemen Strategi Pengembangan SDM); 2) Manajemen Pengetahuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); 3) Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); 4) <i>Coaching</i> , Monitoring dan Konseling Aparatur Pemerintah Kota Bekasi; 5) Pedoman Penyelenggaraan Magang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
15	Bagian Organisasi	1) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 2) Nomenklatur dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 3) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi; 4) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 5) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 6) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 7) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		8) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Bekasi; 9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; 10) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 11) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 12) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 13) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; 14) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 15) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi; 16) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 17) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 18) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Kota Bekasi; 19) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 20) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 21) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; 22) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		23) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; 24) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 25) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi; 26) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 27) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi; 28) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi; 29) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 30) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 31) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi; 32) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi; 33) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD